



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI, BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: DPRD Provinsi Sumatera Utara
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 21 Januari 2010
Waktu	: Pukul 14.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	Drs. H.Irgan Chairul Mahfiz/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: Membicarakan mengenai Sektor Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Tenaga Kerja (Jamsostek/UU No.3 Tahun 1992) di Provinsi Sumatera Utara
Jumlah kehadiran	: 24 Anggota dari 46 Anggota Komisi IX DPR RI, orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara dibuka pukul 14.20 WIB dan setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tertib Pasal 245 ayat (1) rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara menyampaikan permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas pada tahun 2010 antara lain:
 - a. Meningkatnya angka kematian bayi dan ibu, karena kurang maksimal memberikan pelayanan terkait anggaran yang terbatas.
 - b. Belum terwujudnya pusat layanan kesehatan bagi warga desa sehingga satu desa ada satu Polindes.
 - c. Memohon bantuan Komisi IX DPR RI adanya tambahan DAK dan dana stimulus, karena bantuan kepada dinas kesehatan provinsi Sumatera Utara selalu menurun setiap tahun.

- d. Keadaan rumah sakit di Sumatera Utara kelas A hanya 1, kelas B berjumlah 8, di kelas B fasilitasnya tidak sesuai dengan standart pelayanan kesehatan, kelas C ada 20 kelas dan kelas D berjumlah 1.
- c. Mengharapkan bantuan Komisi IX DPR RI agar rumah sakit spesialis untuk penyakit ginjal dan hipertensi di Sumatera Utara, mengingat angka penderita penyakit ginjal dan hipertensi di Sumatera Utara begitu tinggi.
2. Perlunya revitalisasi Posyandu karena berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang ditemukan adalah adanya kasus gizi buruk, meningkatnya kasus penyakit menular, partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan menurun, diindikasikan karena Posyandu di setiap desa atau kelurahan tidak aktif, dana operasional belum ada di provinsi. Untuk revitalisasi tahun 2011 jumlah Posyandu 14.622 unit sehingga diperlukan anggaran Rp. 17.546.400.000,-. Diharapkan sharing dari pusat, provinsi dan kab/kota, termasuk dana dekonsentrasi, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota.
3. Desa siaga adalah merupakan salah satu program terobosan yang bersifat nasional, dilaksanakan dalam rangka percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
Permasalahan Program Desa Siaga di Sumatera Utara, diantaranya :
 - (1) Perkembangan kab/kota dalam pembangunan pos kesehatan desa (Poskesdes) belum maksimal.
 - (2) Alokasi anggaran untuk pelatihan Bidan dan kader kesehatan berjumlah 2 orang per desa.
 - (3) Insentif/biaya operasional bagi Bidan dan Kader Kesehatan diperlukan biaya sebesar Rp. 13.785.600.000,-. Diharapkan sharing dari pusat, provinsi dan kab/kota.
4. Adanya indikasi masyarakat mampu di provinsi Sumatera Utara berobat ke luar negeri (Malaysia). Untuk mengatasi hal itu Dinkes Sumut berupaya meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standart Depkes; dan akan dibentuk pilot project pelayanan satu atap berikut layanan dokter spesialis. Perlu segera dilakukan akreditasi terhadap rumah sakit-rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan dari 172 RS baru, 16 rumah sakit pemerintah/swasta yang terakreditasi.
5. Perlu bantuan Komisi IX DPR RI karena saat ini di Sumatera Utara diperlukan peningkatan pelayanan spesifik, yang selama ini mempunyai balai kesehatan masyarakat, yang akan ditingkatkan menjadi balai kesehatan indera masyarakat dan sudah di Perdakan kelembagaannya dan hanya pengembangannya belum bias maksimal karena perlu membiayai tenaga dan sarana/prasarananya, termasuk peningkatan balai paru, penyakit infeksi serta pelayanan hipertensi dan penyakit ginjal.
6. APBN telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan bea siswa kepada para dokter-dokter umum yang dikirim ke seluruh Indonesia, untuk menempuh pendidikan spesialis dan harus kembali ke daerah setelah pendidikan berakhir.
7. Gubernur telah memprakarsai bersama kaukus DPR dan DPD supaya mendapat dana bagi hasil dari perkebunan. Dengan dana bagi hasil perkebunan diharapkan APBD akan meningkat dan sekaligus akan meningkatkan APBD Provinsi.
8. Kepesertaan masyarakat terhadap program Jamsostek masih kurang, sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan wajib mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta Jamsostek.
9. Komisi IX DPR RI diharapkan dapat mendukung Dinas Kesehatan Sumatera Utara untuk menambah anggaran guna meningkatkan pelayanan dan mutu rumah sakit, agar masyarakat Sumatera Utara tidak perlu berobat ke luar negeri, karena kalau itu terjadi maka akan sangat fatal bagi rumah sakit umum di Sumatera Utara.

10. Derajat kesehatan masyarakat Indonesia secara umum masih perlu ditingkatkan, strategi pembangunan di bidang kesehatan perlu direvisi dan perlu dicermati, upaya promotif dan preventif harus menjadi perhatian dengan merubah perilaku masyarakat di bidang kesehatan.
11. Komisi IX DPR RI diharapkan memperjuangkan anggaran untuk beasiswa dokter-dokter yang perlu disekolahkan kembali untuk mengambil spesialis.

III. CATATAN PENTING

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara pada hari ini menghasilkan catatan penting sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI mengucapkan terima kasih atas kehadiran anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara sebagai wujud adanya kerjasama antara Pusat dan Daerah.
2. Komisi IX DPR RI dapat memahami aspirasi yang disampaikan oleh Komisi E DPRD Sumatera Utara dan akan menjadi bahan masukan Komisi IX DPR RI pada saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010, Rapat Kerja dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 dan Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Jamsostek (Persero) yang akan diagendakan pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2010 dalam rangka dukungan Komisi IX DPR RI untuk peningkatan dana APBN sektor kesehatan, social dan tenaga kerja di Sumatera Utara.

Rapat diakhiri pukul 16.10 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ